

NEWS ANALYSIS

DR TEGUH YUWONO M.POL.ADMIN

KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK FISIP UNDIP SEMARANG



IST

Risiko Demokrasi

DILIHAT dari perspektif hak asasi manusia, siapapun bisa maju sebagai kepala desa. Entah itu suami-istri, keponakan-paman. Hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah. Pencalonan berbau kekerabatan ini merupakan efek dari tidak boleh adanya calon tunggal sehingga pihak tertentu mengajukan orang yang paling bisa menjadi alat kompetisi.

Hal tersebut tak lepas dari peran demokrasi yang menghendaki adanya dua pilihan. Inilah efek yang timbul dari kompetisi yang harus dibangun di bawah teori demokrasi.

Namun, terkait adanya kasus calon kepala desa *incumbent* yang melawan istri, hal tersebut biasanya karena kepala desa tersebut memiliki kinerja bagus. Selain itu, citra kepala desa tersebut cukup kuat dan tak ada

orang lain yang mengajukan diri karena takut kalah. Karena tidak adanya lawan dalam kontestasi tersebut, diajukanlah sang istri.

Inilah risiko terhadap pilihan atas demokrasi yang menghendaki pilihan lebih dari satu kandidat. Inilah realitas yang tidak bisa dihindari dari proses politik di Indonesia.

Terkait adanya evaluasi perihal pasangan suami-istri yang menjadi calon kepala desa, harus diatur lebih lanjut. Bila hanya terdapat calon tunggal dalam Pilkades, apakah perlu dilakukan pemilihan dan penetapan langsung sebagai bentuk efisiensi.

Namun, tentu saja, pemilihan dan penetapannya harus diatur undang-undang desa dan diatur oleh peraturan di bawahnya. (arh)